

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 dapat diselesaikan .

Penyusunan Rencana Kerja merupakan kewajiban bagi setiap satuan unit kerja (Perangkat Daerah) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dan menjadi pedoman seluruh komponen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun Anggaran 2021.

Sungai Raya,

2020


Kepala BPKAD
Kabupaten Kubu Raya
Drs. Gunawan Putra, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19741124 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	64
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	79
BAB V PENUTUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2021.

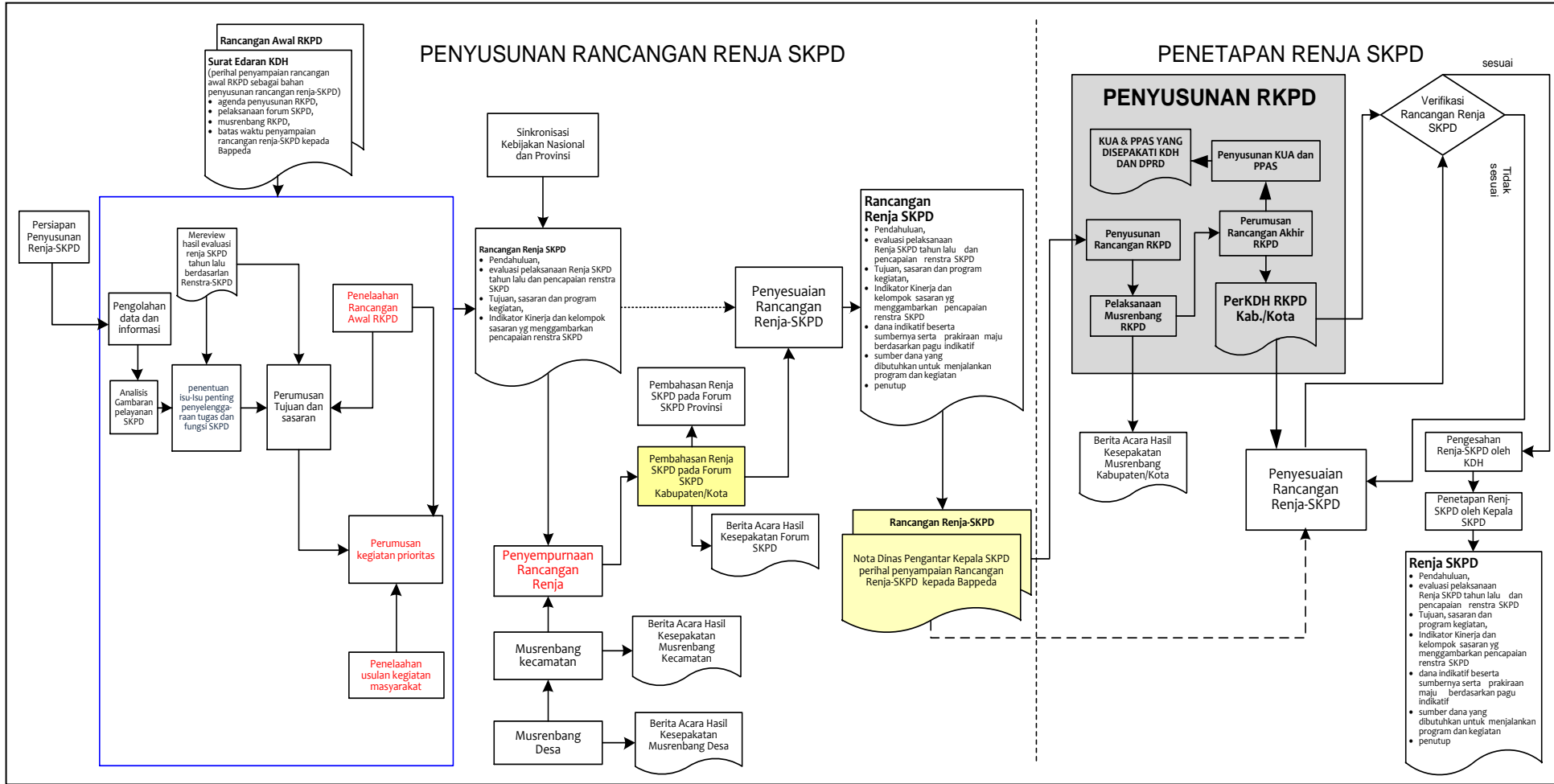
Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
2. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut:

Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Kubu Raya yaitu **Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan Rakyat** dan Visi Kabupaten Kubu Raya **”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Relihiug”**, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dan peningkatan nilai SAKIP.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65A)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Menetapkan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dijadikan tolok ukur kinerja sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun 2021.
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.
3. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran untuk peningkatan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan kajian/ *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Tahun 2020, kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja BPKAD tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 8 (delapan) Program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 6 (enam) Program dan 63 (enam puluh tiga) kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									

4	4	1	1	1		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	600	%			100	%	100	%	155%	100	%	200	33%
4	4	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman surat	5	Tahun			-	-	0%	1	Tahun	1	20%		
4	4	1	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	138	unit			23	Unit	-	0%	23	unit	23	17%	
4	4	1	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan petugas pekerja dan kelengkapan administrasi keuangan	6	Tahun			1	Tahun	-	0%	1	Tahun	1	17%	
4	4	1	1	1	8	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya petugas, peralatan dan bahan pembersih	6	Tahun			1	Tahun	-	0%	1	Tahun	1	17%	
4	4	1	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Kebutuhan alat Tulis Kantor	6	Tahun			1	Tahun	-	0%	1	Tahun	1	17%	

4	4	1	1	1	11	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	6 Tahun		1 Tahun	-	0%	1 Tahun	1	17%
4	4	1	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	6 Tahun		1 Tahun	-	0%	1 Tahun	1	17%
4	4	1	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Penyediaan bahan informasi/ koran	15.944 Eksemplar		3.189 Eksemplar	636 Eksemplar	20%	2.551 Eksemplar	3.187	20%
4	4	1	1	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minum rapat	7.231 Kotak		1.231 Kotak	291 Kotak	24%	1.200 Kotak	1491	21%
4	4	1	1	1	18	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	176 Kali		31 Kali	22 Kali	71%	29 Kali	51	29%
4	4	1	1	1	19	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	85 Kali		20 Kali	8 Kali	40%	13 Kali	21	25%

4	4	1	1	1	25	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	6 Tahun		1 Tahun		0%	1 Tahun	1	17%
4	4	1	1	2		PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	600 %		100 %	100 %	100%	100 %	200	33%
4	4	1	1	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung kantor	6 Paket		1 Paket		0%	1 Paket	1	17%
4	4	1	1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	peralatan Gedung kantor	71 Unit		21 Unit		0%	10 Unit	10	14%
4	4	1	1	2	10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	8 Unit		Unit		0%		0	0%
4	4	1	1	2	12	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tersedianya bangunan dan ruangan gedung arsip	12 Unit		2 Unit	1 unit	50%	2 Unit	3	25%

4	4	1	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan gudang dokumen	6	Tahun			1	Tahun			0%	1	Tahun	1	17%
4	4	1	1	2	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Pemeliharaan Berkala kendaraan dinas operasional roda 4(empat)	12	Unit			2	Unit			0%	2	Unit	2	17%
4	4	1	1	2	26	Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala perlengkapan Gedung kantor	6	Tahun			1	Tahun			0%	1	Tahun	1	17%
4	4	1	1	2	28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan berkala peralatan Gedung kantor (mesin foto kopi)	6	Tahun			1	Tahun			0%	1	Tahun	1	17%
4	4	1	1	2	30	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	Berfungsinya peralatan komputer dengan baik	6	Tahun			1	Tahun			0%	1	Tahun	1	17%

4	4	1	1	2 3	4	Pemeliharaan Website	Berfungsinya Website BPKAD Kab. Kubu Raya	6 Website		1 Website		0%	1 Website	1	17%
4	4	1	1	3		PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	600 %		100 %	100 %	100%	100 %	200	33%
4	4	1	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	276 Stel		69 Stel		0%	69 Stel	69	25%
4	4	1	1	5		PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	600 %		100 %	100 %	100%	100 %	200	33%
4	4	1	1	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangan	Pengiriman peserta Bimtek	53 Orang		13 Orang	7 Orang	54%	8 Orang	15	28%

4	4	1	1	5	7	Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan	5	Dokumen				0%	1	Dokumen	1	20%
4	4	1	1	5	27	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan DUK, SKP, Kenaikan Gaji Berkala, Inpassing, Cuti, Usulan Kenaikan Pangkat, daftar hadir, dankartu induk pegawai	48	Dokumen	8	Dokumen		0%	8	Dokumen	8	17%
4	4	1	1	5	28	Pembelajaran Dikantor Sendiri (Inhouse Training)	Terlaksanya latihan pembelajaran di kantor sendiri	12	Kali				0%	2	Kali	2	17%
4	4	1	1	5	10	Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB)	Terlaksananya Analisis Jabatan SKPD	5	Dokumen				0%	1	Dokumen	1	20%

4	4	1	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	600 %		100 %	100 %	100%	100 %	200	33%
4	4	1	1	6	1	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	6 Dokumen		1 Dokumen		0%	1 Dokumen	1	17%
4	4	1	1	6	2	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	6 Dokumen		1 Dokumen		0%	1 Dokumen	1	17%
4	4	1	1	6	4	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 Dokumen		1 Dokumen		0%	1 Dokumen	1	17%

4	4	1	1	6	12	Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah / LPPD	Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ BPKAD	24	Dokumen		4	Dokumen		0%	4	Dokumen	4	17%	
4	4	1	1	6	8	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Terlaksananya penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPPA	8	Dokumen		4	Dokumen		0%	4	Dokumen	4	50%	
4	4	1	1	1	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	600	%		100	%	100	%	100%	100	%	200	33%
4	4	1	1	1	7	6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	6	Dokumen		1	Dokumen		0%	1	Dokumen	1	17%

4	4	1	1	17	7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Perbup APBD	6	Dokumen		1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%
4	4	1	1	17	8	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD	6	Dokumen		1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%
4	4	1	1	17	9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup Perubahan APBD	6	Dokumen		1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%
4	4	1	1	17	68	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	peningkatan pemahaman SKPD dalam Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	216	PD		36	PD	0%	36	PD	36	17%

4	4	1	1	1 7	53	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPKD	86 Dokume n		12 Dokume n		0%	12 Dokum en	12	14%
4	4	1	1	1 7	14 4	Peningkatan Pengelolaan Anggaran SKPD	Bertambahnya pemahaman aparatur akan pengelolaan keuangan SKPD	6 Kali		1 Kali		0%	1 Kali	1	17%
4	4	1	1	1 7	11 8	Penyediaan Kelengkapan SIMDA BMD	Tersedianya dukungan SIDa BMD terhadap SIMRAL	60 Bulan				0%	12 Bulan	12	20%
4	4	1	1	1 7	79	Rekonsiliasi Dana Perimbangan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Perimbangan	6 Tahun		1 Tahun		0%	1 Tahun	1	17%

4	4	1	1	17	24	Penatausahaan Keuangan daerah	Penerbitan surat Perintah Penyediaan Dana Pemerintah Kab. Kubu Raya	69.896	SP2D		9226	SP2D	823	SP2D	9%	12.134	SP2D	12957	19%
4	4	1	1	17	137	Rekonsiliasi Penggajian	Terlaksanya Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/PT. Taspen dan BPJS	24	Kali		4	Kali	1	Kali	25%	4	Kali	5	21%
4	4	1	1	17	23	Penataan Administrasi Penggajian	Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	84	Dokumen		14	Dokumen	3	Dokumen	21%	14	Dokumen	17	20%
4	4	1	1	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pemahaman aparaturnya terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah	32	Kali		2	Kali			0%	6	Kali	6	19%

4	4	1	1	17	4	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	Peraturan tentang Perbup dan Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah	120	Dokumen	20	Dokumen	0%	20	Dokumen	20	17%
4	4	1	1	17	10	penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERDA TT. Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	6	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%
4	4	1	1	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERBUP tt. Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD	6	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%
4	4	1	1	17	76	Manajemen Sistem Pengelolaan keuangan berbasis Akrual	Persentase peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	588	Orang	98	Orang	0%	98	Orang	98	17%

4	4	1	1	17	119	Pembinaan Penyusunan Laporan Fungsional bendahara SKPD	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Persediaan	588	Orang			98	Orang	0%	98	Orang	98	17%
4	4	1	1	17	28	Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, NERACA, CaLK	Laporan Keuangan Daerah (LRA,LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	120	Dokumen			20	Dokumen	0%	20	Dokumen	20	17%
4	4	1	1	17	141	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan Keuangan Semesteran	288	Dokumen			48	Dokumen	0%	48	Dokumen	48	17%
4	4	1	1	17	147	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD)	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	3.036	SPD			506	SPD	0%	506	SPD	506	17%

5	4	1	1	17	120	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	Tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai dasar penyusunan ASB	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	0	0%
4	4	1	1	17	91	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	Standardisasi biaya pemeliharaan barang daerah	6	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	17%
4	4	1	1	17	49	Inventari Barang daerah	Terlaksana inventarisasi barang milik daerah	12	Dokumen	2	Dokumen	0%	2	17%
4	4	1	1	17	55	Rekonsiliasi laporan keuangan, aset dan Barang Persediaan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	61	Kali	1	Kali	0%	12	20%

4	4	1	1	17	16	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	600 %		100 %		0%	100 %	100	17%
4	4	1	1	17	93	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya kemampuan manajemen pengurus dan penyimpan barang	600 Orang		100 Orang		0%	100 Orang	100	17%
4	4	1	1	17		Sensus Barang Milik daerah	Informasi dan Data Barang Milik daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		0%		0	0%
4	4	1	1	17	50	penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	Data nilai aset yang sudah di nilai	12 Dokumen		2 Dokumen		0%	2 Dokumen	2	17%

4	4	1	1	17	51	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Data kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	12	Dokumen		2	Dokumen	0%	2	Dokumen	2	17%
4	4	1	1	17	74	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	6	Dokumen		1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%
4	4	1	1	17	92	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang diamankan	375	Unit		25	Unit	0%	70	Unit	70	19%
4	4	1	1	17	148	Manajemen pemetaan Aset daerah	Database Peta Aset Daerah	6	Dokumen		1	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	17%

4	4	1	1	17	140	Penyelesaian Kerugian daerah	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah	6	Dokumen		1	Dokumen		0%	1	Dokumen	1	17%	
4	4	1	1	17	2	Penyusunan standar satuan Harga	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	12	Dokumen		2	Dokumen		0%	2	Dokumen	2	17%	
4	4	1	1	33		Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Derah	600	%		100	%	100	%	100%	100	%	200	33%
4	4	1	1	33	29	peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik	6	Tahun		1	Tahun		0%	1	Tahun	1	17%	

4	4	1	1	3 3	32	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	Terlaksana penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	12 Dokumen		6 Dokumen		0%	6 Dokumen	6	50%
4	4	1	1	2 1		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	600 %		100 %	100 %	100%	100 %	200	33%
4	4	1	1	2 1	44	Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen		0%		0	0%
4	4	1	1	2 1	80	penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan evaluasi SKPD	Terlaksana penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi	48 Dokumen		8 Dokumen		0%	8 Dokumen	8	17%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah Realisasi capaian Renstra 2019-2024 untuk program/kegiatan yang sampai dengan tahun 2019 belum mencapai 100%.

Realisasi capaian Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja hasil.

Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan yaitu:

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yaitu 77,51%
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yaitu 99,97%
- Penyediaan Alat Tulis Kantor yaitu 99,95%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu 92,24%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yaitu 99,95%
- Penyediaan makanan dan minuman yaitu 99,94%
- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 99,44%
- Penataan Arsip / Dokumen Pengelolaan Keuangan yaitu 96,75%
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yaitu 98,18%
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yaitu 98,39%
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor yaitu 99,95%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yaitu 98,83%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yaitu 96,67%
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer yaitu 97,50%

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yaitu 95,65%
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu 98,82%
- Pengelolaan Dokumen Kepegawaian yaitu 99,93%
- Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu 99,46%
- Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran yaitu 98,80%
- Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun yaitu 99,46%
- Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA yaitu 98,11%
- Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SPKD yaitu 99,46%
- Penyusunan Standar Satuan Harga yaitu 96,71%
- Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 97,19%
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yaitu 91,14%
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yaitu 91,14%;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yaitu 96,40%; dan
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yaitu 98,86%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yaitu 88,76%
- Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yaitu 99,97%
- Penataan Administrasi Penggajian yaitu 98,74%
- Penatausahaan Keuangan Daerah yaitu 99,99%
- Inventarisasi Barang Daerah yaitu 99,31%
- Penilaian Barang Inventarisasi Milik Pemda Kabupaten Kubu Raya yaitu 99,38%

- Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu 98,22%
 - Asistensi Penyusunan RKA, DPA, Dan Anggaran Kas SKPD yaitu 96,58%
 - Penghapusan barang inventaris milik pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu 91,57%
 - Manajemen Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual yaitu 99,85%
 - Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah yaitu 96,16%
 - Pengamanan Barang Milik Daerah yaitu 93,88%
 - Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yaitu 98,83%
 - Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD yaitu 95,33%
 - Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu 82,91%
 - Rekonsiliasi Penggajian yaitu 99,94%
 - Penyelesaian kerugian daerah yaitu 32,63%
 - Penyusunan laporan konsolidasi laporan keuangan semesteran daerah yaitu 99,94%
 - Peningkatan pengelolaan anggaran yaitu 95,52%
 - Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD yaitu 79,37%
 - Sensus Barang Milik Daerah yaitu 95,22%
 - Rekonsiliasi Dana Perimbangan yaitu 90,58%
 - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu 96,31%
 - Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD yaitu 96,58%
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu 73,75%
 - Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu 96,67%
- b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah

Realisasi capaian Renstra 2019-2024 untuk program/kegiatan yang sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%.

Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan yaitu:

- Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat yaitu 100%;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yaitu 100%
 - Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 100%
 - Manajemen Penatausahaan Barang Daerah yaitu 100%
 - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LPE, LO, LP-SAL, Neraca, CaLK) yaitu 100%
 - Penyusunan Daftar Kebutuhan Dan PemeliharaanBarang Daerah yaitu 100%
 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan,Aset dan barang persediaan yaitu 100%
 - Manajemen Aplikasi Pemetaan Aset Daerah yaitu 100%
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu:
- Komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Ketersediaan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Ketersediaan sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Hubungan kerja dengan instansi terkait dan *stakeholder*; dan
 - Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Realisasi pelaksanaan kinerja program/ kegiatan sangat berpengaruh terhadap capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi pelaksanaan kinerja program/ kegiatan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renstra 2019-2024. Terpenuhi atau tidak tercapainya target capaian program/ kegiatan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan merupakan dasar untuk menentukan kebijakan organisasi.
- e. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu:
- Menyediakan/ mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Menyediakan sarana kerja yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui mengikutsertakan personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada

- pelatihan baik formal maupun informal khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Mengikuti dan menaati regulasi/ perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pada tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 9 (sembilan) indikator kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara umum, pelaksanaan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sesuai yang ditargetkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kubu Raya

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	-	-	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Penetapan tanggal 18 Desember Tahun 2019	Penetapan tanggal 14 Desember Tahun 2020	-	-	

2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP	-	-	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	tahun anggaran berakhir Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Penyampaian tanggal 29 Maret 2019	Penyampaian tanggal 30 Maret 2020	-	-	
3	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai peraturan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Berdasarkan tabel tersebut, Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 116 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Desember 2019

2. Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah pada periode tertentu. Indikator kinerja ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 297 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun 2018, realisasi penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 yaitu pada tanggal 29 Maret 2019.

Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Indikator

kinerja ini mengukur kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dinilai dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) terhadap SAP. Pada tahun 2019, realisasi indikator kinerja ini 100%.

3. Persentase Perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai peraturan.

Pada indikator kinerja ini, pengukuran dilakukan terhadap pengelolaan aset daerah oleh perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2019, indikator kinerja ini ditargetkan terelisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terealisasinya indikator kinerja ini karena seluruh perangkat daerah telah melakukan pengelolaan aset sesuai peraturan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD dan Catatan Strategis

Isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas BPKAD saat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

Hal-hal krusial yang berhubungan dengan proses perencanaan diantaranya analisis dan proyeksi program kegiatan dan keuangan yang tepat, sesuai dengan aturan/standar serta kemampuan daerah. Akurasi proses perencanaan akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Salah satu isu penting di BPKAD pada tahun anggaran 2020 yang harus mendapat perhatian adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, program dan kegiatan

harus diawali dengan proses perencanaan yang optimal terutama dalam penetapan target indikator kinerja utama agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika di lapangan.

Penatausahaan sebagai proses pengelolaan administrasi keuangan dari realisasi pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu senantiasa akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahun anggaran 2020, proses penatausahaan administrasi keuangan di BPKAD baik dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Daerah maupun SKPKD ditandai dengan pemanfaatan perangkat lunak (*software*) untuk mendukung proses kerja. Berjalannya fungsi penatausahaan dengan baik diharapkan akan menghasilkan pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang *reliable* dan minim dari berbagai catatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dalam format laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKAD mempunyai peranan strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Isu penting lainnya berkaitan dengan laporan keuangan Kabupaten Kubu Raya adalah penyelesaian berbagai catatan BPK dan upaya-upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka penerapan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.

Pengelolaan aset daerah (manajemen aset) juga menjadi fokus program dan kegiatan di tahun 2020. Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan aset akan terus diperbaiki dengan dukungan peraturan dan aplikasi *software* manajemen aset terkini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga menjalankan fungsi perbendaharaan daerah, verifikasi, pembukuan dan pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya. Fungsi perbendaharaan berkaitan dengan penyediaan instrument-instrumen pembayaran terhadap semua program dan kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi persepsi mekanisme

perbendaharaan diantara pelaksana masih menjadi tantangan tersendiri bagi BPKAD di masa datang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD diantaranya :

- a. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset secara kualitas dan kuantitas belum memadai;
- b. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia pada organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai;
- d. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan; dan
- e. Masih lemahnya koordinasi dan komitmen organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya dalam membenahi permasalahan aset yang berada dalam penguasaannya.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. Meningkatnya intensitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Kesamaan pandangan dan pemahaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif dan legislatif

Rekomendasi dan Catatan Strategis

- a. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan melakukan koordinasi serta pendampingan pada perangkat daerah dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan membangun komitmen aparatur dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan aset daerah.
- e. Mengupayakan penerapan “*reward and punishment*” secara proporsional; dan
- f. Menjaga hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait dan *stakeholder*.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Perbandingan antara rancangan awal usulan RKPD tahun 2020 dengan hasil analisa kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	806.696.120	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	659.905.174	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	23 Unit	6.407.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua	23 Unit	58.406.902	

Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit	95.000.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKAD	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Tahun	67.831.500	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKAD	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Tahun	166.800.000	
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	BPKAD	Kebersihan Kantor BPKAD Kab. Kubu Raya	1 Tahun	38.397.700	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	BPKAD	Kebersihan Kantor BPKAD Kab. Kubu Raya	1 Tahun	61.934.820	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Jumlah penyediaan alat Tulis Kantor	1 Tahun	144.046.320	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Jumlah penyediaan alat Tulis Kantor	1 Tahun		
Penyediaan Makanan Dan Minuman	BPKAD	Jumlah Penyediaan makanan dan minum rapat	1200 Kotak	57.557.500	Penyediaan Makanan Dan Minuman	BPKAD	Jumlah Penyediaan makanan dan minum rapat	1200 Kotak	189.753.122	
Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Barang yang dicetak	135 Barang Cetak	15.000.000	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Barang yang dicetak	135 Barang Cetak	9.590.910	
		Jumlah penggandaan	40000 Lembar				Jumlah penggandaan	40000 Lembar		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun	37.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.293.420	
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	BPKAD	Jumlah penyediaan surat kabar/ koran	2551 Eksemplar	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	BPKAD	Jumlah penyediaan surat kabar/ koran	2551 Eksemplar	7.920.000	
Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	BPKAD	Koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara, ibu kota Provinsi, dan daerah lain	29 kali	207.000.000	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	BPKAD	Koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara, ibu kota Provinsi, dan daerah lain	29 kali	102.606.000	
Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	BPKAD	Koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	13 kali	39.305.200	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	BPKAD	Koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	13 kali		
Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	BPKAD	Jumlah Dokumen keuangan yang diarsipkan	12 Dok	175.850.400	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	BPKAD	Jumlah Dokumen keuangan yang diarsipkan	12 Dok	0	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Tersedianya Jasa Pengiriman Laporan Keuangan	1 Tahun	3.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Tersedianya Jasa Pengiriman Laporan Keuangan	1 Tahun	57.600.000	
2	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100%	1.071.448.200	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	100%	265.441.523	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	25.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	39.600.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah peralatan Gedung Kantor	10 unit	265.517.500	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah peralatan Gedung Kantor	10 unit	0	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BPKAD	Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BPKAD	Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	0	
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	BPKAD	Jumlah Gedung/ Gudang yang disewa	2 Unit	180.000.000	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	BPKAD	Jumlah Gedung/ Gudang yang disewa	2 Unit	190.773.523	

	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Rata-rata pemeliharaan peralatan Gedung kantor dalam 1 tahun	1 Tahun	36.300.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	Rata-rata pemeliharaan peralatan Gedung kantor dalam 1 tahun	1 Tahun	35.068.000	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	BPKAD	Rata-rata pemeliharaan peralatan komputer dalam 1 tahun	1 Tahun	26.730.000	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	BPKAD	Rata-rata pemeliharaan peralatan komputer dalam 1 tahun	1 Tahun	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Terlaksananya Penyediaan Mobil Dinas	1 Buah	365.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Terlaksananya Penyediaan Mobil Dinas	1 Buah	0	
	Pengadaan Mebeler	BPKAD	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Pegawai	1 Tahun	62.900.700	Pengadaan Mebeler	BPKAD	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Pegawai	1 Tahun	0	
3	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	0	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	63.310.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BPKAD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BPKAD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		63.310.000	

4	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	0	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	57.454.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Pengiriman peserta Bimtek		0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Pengiriman peserta Bimtek		21.814.000
	Pembelajaran di Kantor Sendiri (in house training)	BPKAD	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang diadakan		0	Pembelajaran di Kantor Sendiri (in house training)	BPKAD	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang diadakan		27.857.500
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan		0	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan		7.782.500

	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	BPKAD	Jumlah Dokumen Kepegawaian SKPD		0	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	BPKAD	Jumlah Dokumen Kepegawaian SKPD			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	46.387.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	40.024.070	
	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Laporan Kinerja Tahunan	1 Dokumen	9.880.000	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Laporan Kinerja Tahunan	1 Dokumen	7.315.960	

	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	BPKAD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BPKAD	2 Dokumen	9.880.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	BPKAD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BPKAD	2 Dokumen		
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	7.505.000	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	8.279.760	
	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	9.880.000	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.708.850	
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	BPKAD	Dokumen Renja, RKA, DPA, dan DPPA	4 Dokumen	9.242.000	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	BPKAD	Dokumen Renja, RKA, DPA, dan DPPA	4 Dokumen	16.719.500	
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	100%	6.793.191.244	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	100%	237.750.428.522	

Penyusunan standar satuan Harga	BPKAD	Dokumen Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	2 Dokumen	71.504.400	Penyusunan standar satuan Harga	BPKAD	Dokumen Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	2 Dokumen	147.101.571	
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Dokumen	54.300.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Dokumen	34.260.000	
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	6 Kali	35.028.000	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	6 Kali		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	1 Dokumen	729.676.549	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	1 Dokumen	446.681.030	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Pebup APBD	1 Dokumen	166.012.200	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Pebup APBD	1 Dokumen		

Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	Perda perubahan APBD	1 Dokumen	612.417.450	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	Perda perubahan APBD	1 Dokumen		
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	PERBUP perubahan APBD	1 Dokumen	132.408.900	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	PERBUP perubahan APBD	1 Dokumen	419.895.370	
Penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	340.940.500	Penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	152.352.943	

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERBUP tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100.417.934	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	PERBUP tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		
Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	Persentase Penatausahaan Barang Daerah	100%	752.000.000	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	Persentase Penatausahaan Barang Daerah	100%	224.004.998	
Penataan Administrasi Penggajian	BPKAD	Dokumen Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	14 Dokumen	106.450.000	Penataan Administrasi Penggajian	BPKAD	Dokumen Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	14 Dokumen	194.560.000	
Penatausahaan keuangan Daerah	BPKAD	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	12134 SP2D	256.199.880	Penatausahaan keuangan Daerah	BPKAD	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	12134 SP2D	10.525.000	

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK,LPE,LO, LP-SAL, Neraca, CALK)	BPKAD	Tersediannya Data dan Laporan Keuangan Daerah berbasis SAP Akrual	20 Dokumen	300.098.250	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK,LPE,LO, LP-SAL, Neraca, CALK)	BPKAD	Tersediannya Data dan Laporan Keuangan Daerah berbasis SAP Akrual	20 Dokumen	483.091.502	
Inventarisasi Barang daerah	BPKAD	Dokumen Penetapan Status Barang Milik Daerah dan Kartu Inventaris Barang	2 Dokumen	88.683.706	Inventarisasi Barang daerah	BPKAD	Dokumen Penetapan Status Barang Milik Daerah dan Kartu Inventaris Barang	2 Dokumen	82.529.343	
Penilaian Barang Inventaris	BPKAD	Dokumen penilaian barang inventaris milik daerah	2 Dokumen	45.250.425	Penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	BPKAD	Dokumen penilaian barang inventaris milik daerah	2 Dokumen	34.380.000	
Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah	2 Dokumen	35.864.620	

Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Dokumen Standar Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	1 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	Dokumen Standar Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	1 Dokumen		
Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	BPKAD	Dokumen Pertanggungjawaban Penatausahaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	1200 Dok	1.180.000.000	Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	BPKAD	Dokumen Pertanggungjawaban Penatausahaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	1200 Dok	226.312.514.677	
Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	BPKAD	Meningkatnya Pemahaman SKPD dalam Penyusunan RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas	36 SKPD	196.500.000	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	BPKAD	Meningkatnya Pemahaman SKPD dalam Penyusunan RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas	36 SKPD	250.702.500	
Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	BPKAD	Dokumen Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	62.960.700	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	BPKAD	Dokumen Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	34.200.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Aset Daerah yang diamankan	70 Unit	160.050.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Aset Daerah yang diamankan	70 Unit	121.573.446	

Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset daerah	BPKAD	Peserta Bimtek Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	100 Orang	172.000.000	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset daerah	BPKAD	Peserta Bimtek Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	100 Orang	0	
Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum daerah dan plafon anggaran sementara		0	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum daerah dan plafon anggaran sementara		269.578.575	
Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	BPKAD	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Persediaan	98 Orang	48.474.000	Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	BPKAD	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Persediaan	98 Orang	0	
Rekonsiliasi Penggajian	BPKAD	Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/PT. Taspen dan BPJS	4 Kali	60.000.000	Rekonsiliasi Penggajian	BPKAD	Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/PT. Taspen dan BPJS	4 Kali	5.043.235.500	

Penyelesaian Kerugian Daerah	BPKAD	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Dokumen	12.900.000	Penyelesaian Kerugian Daerah	BPKAD	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Dokumen	13.879.685	
Penyusunan Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan keuangan Tri Wulan/ semesteran	48 Buku	111.666.150	Penyusunan Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan keuangan Tri Wulan/ semesteran	48 Buku	0	
Peningkatan Pengelolaan Anggaran	BPKAD	Bimtek Pengelolaan Anggaran	1 Kali	104.996.200	Peningkatan Pengelolaan Anggaran	BPKAD	Bimtek Pengelolaan Anggaran	1 Kali	309.845.250	
Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD) SKPD	BPKAD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	506 SPD	8.998.000	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD) SKPD	BPKAD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	506 SPD	35.910.000	
Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	BPKAD	Database Peta Aset Daerah	1 Dokumen	164.278.000	Manajemen pemetaan Aset daerah	BPKAD	Database Peta Aset Daerah	1 Dokumen		
Rekonsiliasi Dana Perimbangan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Perimbangan	1 Tahun	72.000.000	Rekonsiliasi Dana Perimbangan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Perimbangan	1 Tahun	2.984.935.916	
Penyediaan Kelengkapan SIMDA BMD	BPKAD	Tersedianya dukungan SIDa BMD terhadap SIMRAL	12 Bulan	436.000.000	Dukungan Penyediaan Kelengkapan SIMDA	BPKAD	Tersedianya dukungan SIDa BMD terhadap SIMRAL	12 Bulan	44.090.120	

	Manajemen System Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	BPKAD	Terlaksananya Bimtek bagi Pengelola Keuangan Daerah di SKPD,SKPKD dan BLUD	98 Orang	67.620.000	Manajemen System Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	BPKAD	Terlaksananya Bimtek bagi Pengelola Keuangan Daerah di SKPD,SKPKD dan BLUD	98 Orang	0	
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset dan Barang Persediaan	12 Kali	36.000.000	Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	BPKAD	Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset dan Barang Persediaan	12 Kali	34.366.100	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	32.360.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.350.376	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	BPKAD	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah	100%	132.610.335	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	BPKAD	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah	100%	0	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPKAD	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1 Tahun	126.978.665	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	BPKAD	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1 Tahun	0	
	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	BPKAD	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	5.631.670	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	BPKAD	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Tujuan Nasional Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan nasional. Kebijakan Nasional merupakan suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari Kebijakan Nasional di Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Berdasarkan kajian *Background Study* bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, terdapat beberapa isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2019-2024 yaitu:

- a. Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - Koordinasi dan Pengawasan Penggunaan Kewenangan
 - Akuntabilitas Kinerja Pelayanan dasar dan Sekotoral
 - Pengelolaan ASN di Daerah
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan
 - Penguatan Penerimaan Daerah

- Efektifitas Belanja Daerah
- c. Pengaturan Ekonomi Lokal, terdiri dari:
 - Pengelolaan SDA Potensi Daerah
 - Perizinan, Investasi dan Penanaman Modal di Daerah
 - Penguatan Efektifitas kerja sama antar daerah
- d. Politik Lokal, terdiri dari:
 - PILKADA dan Kapasitas Kepala Daerah
 - Otonomi Khusus dan Daerah Otonom Baru
 - Hubungan Kepala Daerah-DPRD

Dari Isu strategis tersebut, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Mendorong Kerja Sama antar Daerah
Mendorong kerja sama antar daerah dan terbentuknya kelembagaan regional pada kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan wilayah lainnya.
- b. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan prioritas anggaran.
- c. Efisiensi APBD
Melanjutkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan APBD.
- d. Peningkatan Pajak Daerah
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi Pajak Daerah.
- e. Peningkatan ASN Bidang Unggulan
Meningkatkan ketersediaan ASN terutama kompetensi bidang pertanian, kehutanan, dan industri manufaktur.
- f. Peningkatan ASN Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatkan ketersediaan dan distribusi ASN bidang pendidikan dan kesehatan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan Arah Kebijakan Efisiensi APBD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah harus mewujudkan terlaksananya efisiensi penggunaan APBD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel, dan transparan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset, dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar; dan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Hal ini berarti kegiatan merupakan bagian dari program dan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kubu Raya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 5 (Lima) Program dan 62 (Enam puluh dua) kegiatan dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp806.696.120,00;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp1.071.448.200,00;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp46.387.000,00;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp6.793.191.244,00; dan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp132.610.335,00;

Prakiraan maju tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.850.332.899,00. Rumusan Rencana Program Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kubu Raya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
4	4	1	1	1										
4	4	1	1	1										
4	4	1	1	1	6	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKAD	100%	659.905.174	APBD		100%	792.110.000
4	4	1	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor roda empat dan roda	BPKAD	23 Unit	58.406.902	APBD		23 Unit	70.100.000

						Operasional	dua							
4	4	1	1	2	24	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	BPKAD	2 Unit		APBD		2 Unit	
4	4	1	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	BPKAD	1 Tahun	166.800.000			1 Tahun	200.160.000
4	4	1	1	1	8	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor BPKAD Kab. Kubu Raya	BPKAD	1 Tahun	61.934.820	APBD		1 Tahun	74.450.000
4	4	1	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat Tulis Kantor	BPKAD	1 Tahun	189.753.122	APBD		1 Tahun	227.750.000
4	4	1	1	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minum rapat	BPKAD	1200 Kotak		APBD		1200 Kotak	

4	4	1	1	1	11	Penyediaan Barang cetakan Dan Peggandaan	Jumlah Barang yang dicetak	BPKAD	135 Barang Cetak	9.590.910	APBD		135 Barang Cetak	11.500.000
						Jumlah peggandaan	40000 Lembar		APBD		40000 Lembar			
4	4	1	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan bangunan kantor	BPKAD	1 Tahun	5.293.420	APBD		1 Tahun	6.400.000
4	4	1	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah penyediaan surat kabar/ koran	BPKAD	2551 Eksemplar	7.920.000	APBD		2551 Eksemplar	9.500.000
4	4	1	1	1	18	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara, ibu kota Provinsi, dan daerah lain	BPKAD	29 kali	102.606.000	APBD		29 kali	123.130.000
4	4	1	1	1	19	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	BPKAD	13 kali		APBD		13 kali	
4	4	1	1	2	25	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen keuangan yang	BPKAD	12 Dok	0	APBD		12 Dok	0

									diarsipkan									
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Laporan Keuangan	BPKAD	1 Tahun	57.600.000	APBD			1 Tahun	69.120.000
0	4	1	1	2					PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	BPKAD	100%	265.441.523	APBD			100%	318.650.000
4	4	1	1	2	7				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 Paket	39.600.000				1 Paket	47.550.000
4	4	1	1	2	9				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor	BPKAD	10 unit	0	APBD			10 unit	0
4	4	1	1	2	22				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	BPKAD	1 Unit	0	APBD			1 Unit	0
5	4	1	1	2	12				Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Jumlah Gedung/ Gudang yang disewa	BPKAD	2 Unit	190.773.523				2 Unit	229.000.000

4	4	1	1	2	28	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rata-rata pemeliharaan peralatan Gedung kantor dalam 1 tahun	BPKAD	1 Tahun	35.068.000	APBD		1 Tahun	42.100.000
5	4	1	1	2	30	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	Rata-rata pemeliharaan peralatan komputer dalam 1 tahun	BPKAD	1 Tahun	0	APBD		1 Tahun	0
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Penyediaan Mobil Dinas	BPKAD	1 Buah	0	APBD	-		0
						Pengadaan Mebeler	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Pegawai	BPKAD	1 Tahun	0	APBD	-		0
						PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	BPKAD		63.310.000	APBD			76.000.000
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD		63.310.000	APBD		69 Stel	76.000.000
						PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD		57.454.000	APBD			69.100.000

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pengiriman peserta Bimtek	BPKAD		21.814.000	APBD		8 Orang	26.200.000
						Pembelajaran di Kantor Sendiri (in house training)	Jumlah Pembelajaran di Kantor Sendiri (In House Training) yang diadakan	BPKAD		27.857.500	APBD		2 kali	33.500.000
						Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	BPKAD		7.782.500	APBD		8 Dokumen	9.400.000
						Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian SKPD	BPKAD			APBD			
4	4	1	1	6	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	BPKAD	100%	40.024.070	APBD		100%	48.450.000
4	4	1	1	6	1	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Tahunan	BPKAD	1 Dokumen	7.315.960	APBD		1 Dokumen	9.000.000
4	4	1	1	17	12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BPKAD	BPKAD	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	

4	4	1	1	6	2	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	BPKAD	1 Dokumen	8.279.760	APBD		1 Dokumen	10.000.000
4	4	1	1	6	4	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	laporan Keuangan akhir tahun	BPKAD	1 Dokumen	7.708.850	APBD		1 Dokumen	9.300.000
4	4	1	1	17	8	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Dokumen Renja, RKA, DPA, dan DPPA	BPKAD	4 Dokumen	16.719.500	APBD		4 Dokumen	20.150.000
4	4	1	1	17	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	BPKAD	100%	237.750.428.522	APBD		100%	240.038.489.000
4	4	1	1	17	2	Penyusunan standar satuan Harga	Dokumen Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	BPKAD	2 Dokumen	147.101.571	APBD		2 Dokumen	176.524.000
4	4	1	1	17	4	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	20 Dokumen	34.260.000	APBD		20 Dokumen	41.112.000
4	4	1	1	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	6 Kali		APBD		6 Kali	
4	4	1	1	17	6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	BPKAD	1 Dokumen	446.681.030	APBD		1 Dokumen	536.050.000

4	4	1	1	17	7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Pebup APBD	BPKAD	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
4	4	1	1	17	8	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perda perubahan APBD	BPKAD	1 Dokumen	419.895.370	APBD		1 Dokumen	503.900.000
4	4	1	1	17	9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERBUP perubahan APBD	BPKAD	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
4	4	1	1	17	10	Penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen	152.352.943	APBD		1 Dokumen	182.850.000
4	4	1	1	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	PERBUP tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
4	4	1	1	17	16	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Daerah	BPKAD	100%	224.004.998	APBD		100%	268.810.000
4	4	1	1	17	23	Penataan Administrasi Penggajian	Dokumen Pengelolaan Administrasi Penggajian Pegawai Pemerintah Kab. Kubu Raya	BPKAD	14 Dokumen	194.560.000	APBD		14 Dokumen	233.472.000

4	4	1	1	17	24	Penatausahaan keuangan Daerah	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	BPKAD	12134 SP2D	10.525.000	APBD		12134 SP2D	12.630.000
						Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	Dokumen Pertanggungjawaban Penatausahaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	1200 Dok	226.312.514.677	APBD		1200 Dok	226.312.550.000
4	4	1	1	17	28	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK,LPE,LO, LP-SAL, Neraca, CALK)	Tersediannya Data dan Laporan Keuangan Daerah berbasis SAP Akrual	BPKAD	20 Dokumen	483.091.502	APBD		20 Dokumen	579.868.000
4	4	1	1	17	49	Inventarisasi Barang daerah	Dokumen Penetapan Status Barang Milik Daerah dan Kartu Inventaris Barang	BPKAD	2 Dokumen	82.529.343	APBD		2 Dokumen	99.040.000
4	4	1	1	17	50	Penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	Dokumen penilaian barang inventaris milik daerah	BPKAD	2 Dokumen	34.380.000	APBD		2 Dokumen	41.256.000
5	4	1	1	17	51	Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	2 Dokumen	35.864.620			2 Dokumen	43.040.000

4	4	1	1	17	91	Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	Dokumen Standar Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	BPKAD	2 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
4	4	1	1	17	68	Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	Meningkatnya Pemahaman SKPD dalam Penyusunan RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas	BPKAD	36 SKPD	250.702.500	APBD		36 SKPD	300.843.000
4	4	1	1	17	74	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	Dokumen Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	BPKAD	1 Dokumen	34.200.000	APBD		1 Dokumen	41.040.000
4	4	1	1	17	92	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang diamankan	BPKAD	70 Unit	121.573.446			70 Unit	145.900.000
4	4	1	1	17	93	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset daerah	Peserta Bimtek Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	BPKAD	100 Orang	0	APBD		100 Orang	0
						Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum daerah dan plafon anggaran sementara	BPKAD	2 Dokumen	269.578.575	APBD		2 Dokumen	323.500.000
4	4	1	1	17	119	Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	Meningkatnya Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan	BPKAD	98 Orang	0	APBD		98 Orang	0

							Persediaan							
4	4	1	1	17	137	Rekonsiliasi Penggajian	Rekonsiliasi Data Gaji KKR dengan Kemenkeu/Bapetarum/PT. Taspen dan BPJS	BPKAD	4 Kali	5.043.235.500	APBD		4 Kali	6.052.000.000
4	4	1	1	17	140	Penyelesaian Kerugian Daerah	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	BPKAD	1 Dokumen	13.879.685	APBD		1 Dokumen	16.660.000
4	4	1	1	17	141	Penyusunan Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran Daerah	Jumlah Laporan keuangan Tri Wulan/ semesteran	BPKAD	48 Buku	0	APBD		48 Buku	0
4	4	1	1	17	144	Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Bimtek Pengelolaan Anggaran	BPKAD	1 Kali	309.845.250	APBD		1 Kali	371.820.000
4	4	1	1	17	147	Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD) SKPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	BPKAD	506 SPD	35.910.000	APBD		506 SPD	43.092.000
4	4	1	1	17	148	Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	Database Peta Aset Daerah	BPKAD	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
4	4	1	1	17	160	Rekonsiliasi Dana Perimbangan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Perimbangan	BPKAD	1 Tahun	2.984.935.916	APBD		1 Tahun	3.581.957.000
4	4	1	1	17		Dukungan Penyediaan Kelengkapan SIMDA	Tersedianya dukungan SIDa BMD terhadap SIMRAL	BPKAD	12 Bulan	44.090.120	APBD		12 Bulan	52.910.000

							Manajemen System Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	Terlaksananya Bimtek bagi Pengelola Keuangan Daerah di SKPD,SKPKD dan BLUD	BPKAD	98 Orang	0	APBD		98 Orang	0
							Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset dan Barang Persediaan	BPKAD	12 Kali	34.366.100	APBD		12 Kali	41.240.000
							Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Dokumen	30.350.376	APBD		1 Dokumen	36.425.000
4	4	1	1	21			Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan aparatur Pemerintah Daerah	BPKAD	100%	0	APBD		100%	0
3	4	1	1	21	44		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	BPKAD	1 Tahun	0	APBD		1 Tahun	0
4	4	1	1	21	80		Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	BPKAD	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang didanani oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program /Kegiatan	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	659.905.174
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	58.406.902
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	166.800.000
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	61.934.820
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	189.753.122
	Penyediaan Barang cetakan Dan Penggandaan	9.590.910
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.293.420
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	7.920.000
	Rapat koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	
	Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	102.606.000
	Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57.600.000
2	PROGRAM peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	265.441.523
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	39.600.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	0
	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	190.773.523

	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.068.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Komputer	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0
	Pengadaan Mebeler	0
3	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	63.310.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	63.310.000
4	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	57.454.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	21.814.000
	Pembelajaran di Kantor Sendiri (in house training)	27.857.500
	Penyusunan Evaluasi Jabatan SKPD	7.782.500
	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	40.024.070
	Penyusunan Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.315.960
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	
	Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	8.279.760
	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	7.708.850
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	16.719.500
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	237.750.428.522
	Penyusunan standar satuan Harga	147.101.571
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan keuangan Daerah	34.260.000
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	446.681.030
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	
	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	419.895.370

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
Penyusunan Rancangan Perda TT. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tt. Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	152.352.943
Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	224.004.998
Penataan Administrasi Penggajian	194.560.000
Penatausahaan keuangan Daerah	10.525.000
Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Pengelolaan keuangan Daerah (SKPKD)	226.312.514.677
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LPE, LO, LP-SAL, Neraca, CALK)	483.091.502
Inventarisasi Barang daerah	82.529.343
Penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	34.380.000
Penyusunan daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	
Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	35.864.620
Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	250.702.500
Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah kab. Kubu Raya	34.200.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	121.573.446
Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset daerah	0
Penyusunan KUA dan PPAS	269.578.575
Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	0
Rekonsiliasi Penggajian	5.043.235.500
Penyelesaian Kerugian Daerah	13.879.685
Penyusunan Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran Daerah	0
Peningkatan Pengelolaan Anggaran	309.845.250
Pengelolaan Surat penyediaan dana (SPD) SKPD	35.910.000
Manajemen Aplikasi pemetaan Aset daerah	0
Rekonsiliasi Dana Perimbangan	2.984.935.916
Dukungan Penyediaan Kelengkapan SIMDA	44.090.120

	Manajemen System Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI	0
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset dan Barang Persediaan	34.366.100
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	30.350.376
7	Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan ketatalaksanaan dan aparatur daerah	0
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0
	Penyusunan Survei kepuasan Masyarakat	0

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya 2019- 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berkualitas. Renja juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya di waktu yang akan datang.
